**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN**

**DAN**

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**

**TENTANG**

**JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN TUBERKULOSIS**

**Nomor : HK.03.01/IX/5190/2023**

**Nomor : 440/KB.04-Huk/2023**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-03-2023)** bertempat di Ball Room Hotel Horison Grand Serpong, kami yang bertandatangan di bawah ini:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **I.** | **AGUS DWI SUSANTO** | : | Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.03.03/Menkes/6468/2021 tanggal 8 Oktober 2021, beralamat di Jalan Raya Persahabatan No. 1 Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**. |

**II. AL MUKTABAR** : Penjabat Gubernur Banten, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 50/P/2022 tentang pengangkatan Penjabat Gubernur tanggal 9 Mei 2022 berkedudukan di Jl. Syech Nawawi Al-Bantani No.1, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Rumah Sakit milik Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) Eks Rumah Sakit Perjan Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan di Jalan Raya Persahabatan No. 1 Jakarta Timur.
2. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Rumah Sakit Jejaring Rujukan sebagai Respirasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/6670/2021 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta sebagai Pusat Respirasi Nasional serta melakukan pengampuan jejaring rujukan Respirasi, dengan didukung ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai.

| | |
|---|---|
| PIHAK I | |
| PIHAK II | |

3. Bahwa **PIHAK KEDUA** berkomitmen untuk mensukseskan program pengampu terhadap layanan prioritas, khususnya layanan dibidang Respirasi dan dan mengoptimalkan keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Banten dan Rumah Sakit lainnya yang berada di wilayah Provinsi Banten yang secara bertahap diharapkan dapat ikut serta dalam mensukseskan program pemerintah sesuai dengan ketersediaan layanan yang dimiliki oleh masing-masing Rumah Sakit.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

| | |
|---|---|
| **PIHAK I** | |
| **PIHAK II** | |

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 965);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Persahabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1536);

| | |
|---|---|
| **PIHAK I** | |
| **PIHAK II** | |

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/6670/2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta sebagai Pusat Respirasi Nasional;
17. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;
18. Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Dalam Negeri RI, dan Kementerian Keuangan RI tentang Akselerasi Sinergi Program Rumah Sakit Jejaring Nasional Nomor HK.03.01/Menkes/6607/2021, Nomor 119/6416.A/SJ, dan Nomor PRJ-14/MK.05/2021 tanggal 16 November 2021.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| **PIHAK I** | |
| **PIHAK II** | |

**Pasal 1**

**Ketentuan Umum**

(1) Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.

(2) Jejaring Pengampuan pelayanan Tuberkulosis adalah program strategis nasional bidang kesehatan dalam hal pengembangan pelayanan Tuberkulosis yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

(3) Pengampuan pelayanan tuberkulosis adalah pengampuan dari rumah sakit strata lebih tinggi dari rumah sakit yang diampu, meliputi layanan diagnosis dan tata laksana tuberkulosis sensitif dan resisten dewasa dan anak, layanan intervensi paru non bedah, layanan bedah thorax, layanan laboratorium mikrobiologi, rehabilitasi medis paru, layanan farmasi, pencatatan dan pelaporan kasus tuberkulosis dan telekonsultasi medis secara online.

(4) Pengampu nasional adalah Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengampuan jejaring pelayanan Tuberkulosis bagi rumah sakit yang diampu strata utama, madya dan paripurna yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.

(5) Pengampu regional adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi yang telah memenuhi kriteria sebagai pengampu regional, yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengampuan Tuberkulosis bagi Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.

(6) Tuberkulosis Sensitif adalah kondisi di mana kuman *Mycobacterium tuberculosis* masih sensitif terhadap Obat Anti TB (OAT) dengan masa pengobatan selama kurang lebih 6-9 bulan.

(7) Tuberkulosis Resisten adalah kondisi di mana kuman *Mycobacterium tuberculosis* telah mengalami kekebalan terhadap Obat Anti TB (OAT)

| | |
|---|---|
| **PIHAK I** | |
| **PIHAK II** | |

(8) Tuberkulosis Anak adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium Tuberculosis* yang menyerang organ paru-paru dan ekstra paru pada usia anak-anak (kurang dari 18 tahun).

(9) Layanan bedah thorax adalah suatu tindakan pembedahan yang dilakukan pada paru dan organ sekitarnya sesuai dengan indikasi pembedahan pada kasus tuberkulosis.

(10) Layanan intervensi paru adalah pelayanan diagnosis dan terapetik untuk saluran jalan nafas, sehingga pasien dapat terdiagnosis secara akurat dan dapat mengatasi sumbatan jalan nafas atau penyempitan saluran nafas dikarenakan berbagai sebab.

(11) Layanan mikrobiologi adalah pemeriksaan terhadap sampel darah, urine, feses, dahak hingga kerokan kulit yang dapat dilakukan melalui pemeriksaan mikroskopis untuk mengetahui penyebab pasti suatu infeksi.

(12) Layanan Farmasi Tuberkulosis adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (termasuk kesembuhan pasien) khususnya pada pasien Tuberkulosis

(13) Rehabilitasi Medik Paru adalah perawatan rehabilitasi individual yang dilakukan oleh tenaga medis kepada pasien setelah menjalani terapi pengobatan standar terkait penyakit paru (infeksi maupun non infeksi).

(14) Pencatatan dan pelaporan Tuberkulosis merupakan pelaporan kasus tuberkulosis yang dilaporkan secara berjenjang ke tingkat kabupaten/kota, provinsi, sampai ke pusat dengan menggunakan sistem informasi secara elektronik yang disebut Sistem Informasi TB Terpadu (SITT) yang berbasis web dan terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan secara nasional.

| | |
|---|---|
| **PIHAK I** | |
| **PIHAK II** | |

(15) Stratifikasi pengampuan dibagi menjadi stratifikasi dasar, madya, utama dan paripurna yang ketentuan terdapat pada Petunjuk Teknis Pengampuan Pelayanan Tuberkulosis di Indonesia.

**Pasal 2**

**Maksud Dan Tujuan**

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah:

a. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
b. untuk dasar dalam mewujudkan kerja sama **PARA PIHAK** yang secara langsung melaksanakan layanan kesehatan dan menjadi Jejaring Pengampuan Pelayanan Tuberkulosis.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

a. Meningkatkan mutu pelayanan tuberkulosis serta penyelenggaraan peningkatan SDM tenaga medis, keperawatan, tenaga kesehatan lainnya dan pencatatan serta pelaporan tuberkulosis di rumah sakit;
b. mensinergikan potensi dari **PARA PIHAK**, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
c. Melakukan pengembangan sarana, prasarana dan alat bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di bidang pelayanan tuberkulosis.

**Pasal 3**

**Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

a. Jejaring Pengampuan Pelayanan Tuberkulosis.
b. Pengembangan SDM meliputi pendidikan dan pelatihan dalam bidang Tuberkulosis;dan

| | |
|---|---|
| PIHAK I | |
| PIHAK II | |

c. Pengembangan sarana, prasarana dan alat untuk layanan diagnosis dan tata laksana tuberkulosis sensitif dan resisten dewasa dan anak, layanan intervensi paru non bedah, layanan bedah thorax, layanan laboratorium mikrobiologi, rehabilitasi medis paru, layanan farmasi, pencatatan dan pelaporan kasus tuberkulosis dan telekonsultasi medis secara online.

**Pasal 4**

**Pelaksanaan**

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

(2) **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penandatanganannya oleh Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit.

(3) Bagi Rumah Sakit lainnya yang berada di wilayah Provinsi Banten juga dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan **PIHAK KESATU** dengan Objek dan Ruang Lingkup sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

**PARA PIHAK** dalam melaksanakan Jejaring Pengampuan Pelayanan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 memiliki kedudukan:

a. **PIHAK KESATU** merupakan pengampu nasional yang bertindak sebagai koordinator pengampuan layanan kanker.

b. **PIHAK KEDUA** merupakan pengampu regional pelayanan kanker terhadap rumah sakit umum daerah di wilayahnya dan secara bertahap terhadap rumah sakit lainnya di wilayah Provinsi Banten.

**Pasal 6**

**Jangka Waktu**

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

| | |
|---|---|
| PIHAK I | |
| PIHAK II | |

(2) Pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi dimasing-masing **PARA PIHAK,** tidak membatalkan terhadap Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang disepakati.

**Pasal 7**

**Korespondensi**

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* atau *WhatsApp* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

**PIHAK KESATU : RSUP PERSAHABATAN**

| | | |
|---|---|---|
| UP 1 | : | Sekretariat Tim Pengampu Tuberkulosis |
| Nama | : | Danah Nurfatin Trispa, SKM |
| No. HP | : | 0878 - 8379 – 3222 |
| UP 2 | : | Sub Koordinator Hukum dan Organisasi (KS.Hukormas) |
| Nama | : | Wahyu Apriyanto, SH |
| No. HP | : | 0811 - 9333 – 191 |
| Alamat | : | Jalan Raya Persahabatan No. 1, Rawamangun – Jakarta Timur, 13230 |
| Telepon | : | 021 – 4891708 |
| Faksmili | : | 021 – 471 1741, 021 – 478 6666 |
| Email | : | info@rsuppersahabatan.co.id<br>hukormas.rsupp@gmail.com. |

| | |
|---|---|
| PIHAK I | |
| PIHAK II | |

**PIHAK KEDUA : DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN**

| | | |
|---|---|---|
| UP | : | 1. Kasie Pelayanan Kesehatan Rujukan |
| | | 2. Pelaksana seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan |
| | | Jl. Syech Nawawi Al Bantani No 1 Serang |
| Telp | : | 087880009002 |
| WhatsApp | : | 1. 087880009002 (dr. Saiful Rahman, MARS) |
| | | 2. 081803020000 (Tina Agustina, MSi,Apt) |
| Alamat | : | Dinas Kesehatan Provinsi Banten |
| -mail | : | rujukannew.dinkesbanten@gmail.com |
| | | rujukanrs.dinkesbanten@gmail.com |

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Tangerang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|---|---|
| **Pj. GUBERNUR BANTEN,** | **DIREKTUR UTAMA RSUP PERSAHABATAN,** |
| **AL MUKTABAR** | **AGUS DWI SUSANTO** |

| | |
|---|---|
| PIHAK I | |
| PIHAK II | |

**PIHAK KEDUA : DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN**

| | | |
|---|---|---|
| UP | : | 1. Kasie Pelayanan Kesehatan Rujukan |
| | | 2. Pelaksana seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan |
| | | Jl. Syech Nawawi Al Bantani No 1 Serang |
| Telp | : | 087880009002 |
| WhatsApp | : | 1. 087880009002 (dr. Saiful Rahman, MARS) |
| | | 2. 081803020000 (Tina Agustina, MSi,Apt) |
| Alamat | : | Dinas Kesehatan Provinsi Banten |
| -mail | : | rujukannew.dinkesbanten@gmail.com |
| | | rujukanrs.dinkesbanten@gmail.com |

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Tangerang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|---|---|
| **Pj. GUBERNUR BANTEN,** | **DIREKTUR UTAMA RSUP PERSAHABATAN,** |
| **AL MUKTABAR** | **AGUS DWI SUSANTO** |

| | |
|---|---|
| PIHAK I | |
| PIHAK II | |

**PIHAK KEDUA : DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN**

| | | |
|---|---|---|
| UP | : | 1. Kasie Pelayanan Kesehatan Rujukan |
| | | 2. Pelaksana seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan |
| | | Jl. Syech Nawawi Al Bantani No 1 Serang |
| Telp | : | 087880009002 |
| WhatsApp | : | 1. 087880009002 (dr. Saiful Rahman, MARS) |
| | | 2. 081803020000 (Tina Agustina, MSi,Apt) |
| Alamat | : | Dinas Kesehatan Provinsi Banten |
| -mail | : | rujukannew.dinkesbanten@gmail.com |
| | | rujukanrs.dinkesbanten@gmail.com |

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Tangerang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

| | |
|---|---|
| **PIHAK KEDUA** | **PIHAK KESATU** |
| **Pj. GUBERNUR BANTEN,** | **DIREKTUR UTAMA RSUP PERSAHABATAN,** |
| **AL MUKTABAR** | **AGUS DWI SUSANTO** |

| | |
|---|---|
| PIHAK I | |
| PIHAK II | |